

**TINJAUAN PENGENAAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 4 AYAT (2)
ATAS JASA KONSTRUKSI PT. DKBP**

Oleh:

Silvi Riani

ABSTRAK

Indonesia perlu meningkatkan upaya pembangunannya untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk mencapai hal ini, sumber daya yang signifikan harus dialokasikan dari pemerintah nasional dan sumber daya yang berasal dari sektor domestik dan asing. Sektor konstruksi merupakan sektor potensial di Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah telah menerapkan peraturan terkait perpajakan kegiatan konstruksi melalui Undang-Undang Perpajakan Kegiatan Konstruksi PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu pajak final yang didasarkan pada nilai proyek konstruksi, hak pemilik, keseimbangan proyek konstruksi, setoran dan utang, hak pakai lokasi konstruksi, dan lokasi konstruksi. Industri konstruksi yang menyediakan jasa konstruksi menjadi pajak, terlepas dari apakah penyedia jasa tersebut memiliki sertifikasi atau tidak. Perpajakan jasa konstruksi membutuhkan manajemen yang tepat dan prosedur hukum yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Metode penulisan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dimana penulis melakukan observasi secara langsung dengan melakukan Praktik Kerja Industri di PT. TRIBUANA GLOBAL GROUP. PT. DKBP dikenakan tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar 1,75% dari nilai kontrak. Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah With Holding System dimana perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) dilakukan oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi penghasilan. Dalam hal ini PT. MKI sebagai pihak pemberi penghasilan.

Kata Kunci: Jasa Konstruksi, PPh Pasal 4 Ayat (2), With Holding System.

**REVIEW THE APPLICATION TARIFF OF PPh
TAX ON 4 SECTIONS (2) ON THE CONSTRUCTION SERVICE
OF PT. DKBP**

By:

Silvi Riani

ABSTRACT

Indonesia needs to enhance its development efforts to achieve its national goals. To achieve this, significant resources must be allocated from the national government as well as resources from domestic and foreign sectors. The construction sector is a potential sector in Indonesia that significantly contributes to national economic growth. The government has implemented regulations related to the taxation of construction activities through the Construction Activities Tax Law, Tax on 4 Sections (2) of Income Tax, which is a final tax based on the value of the construction project, the owner's rights, the balance of the construction project, deposits and debts, usage rights of the construction site, and the construction site location. The construction industry providing construction services is subject to tax, regardless of whether the service provider is certified or not. The taxation of construction services requires proper management and effective legal procedures to achieve the desired results. The writing method used is a qualitative approach where the author conducts direct observations through Industrial Work Practices at PT. TRIBUANA GLOBAL GROUP. PT. DKBP is subject to an Tax on 4 Sections (2) Income Tax rate of 1.75% of the contract value. The tax collection system used is the Withholding System where the calculation, deduction, payment, and reporting of Tax on 4 Sections (2) Income Tax is carried out by a third party, the income provider. In this case, PT. MKI as the income provider.

Keywords: Construction Services, Tax on 4 Section (2), Withholding System.